

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan masyarakat, atau yang kerap disebut sebagai humas, merupakan divisi yang memiliki peran penting dalam sebuah organisasi. Keberadaan humas sangatlah krusial, terutama pada instansi pemerintahan yang terus berinteraksi dengan publik dan masyarakat luas. Humas berperan sebagai representatif organisasi dan garda terdepan saat lembaga pemerintahan terkena suatu isu (Lani & Handayani, 2021). Sesuai dengan fungsinya, humas bertugas membangun opini publik yang positif melalui komunikasi timbal balik dengan masyarakat, serta memberikan layanan dan menampung aspirasi masyarakat (Mujiarto dkk., 2024). Tidak terbayangkan jika sebuah organisasi pemerintahan tidak memiliki divisi humas; tentu komunikasi dalam lembaga tersebut akan menjadi tidak terkoordinasi karena tidak ada yang mengelola informasi. Dewasa ini, pemerintah di berbagai tingkat, mulai dari kementerian, humasovinsi, kabupaten/kota, hingga desa, diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, berintegritas tinggi, serta transparan dalam penyampaian informasi (Adisti & Setiawan, 2021).

Salah satu tugas utama humas di instansi pemerintahan adalah menjalin hubungan yang baik dengan media massa untuk mendukung peranannya sebagai corong informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Media berfungsi sebagai sarana komunikasi antara publik dan humas (Annisa, 2022). Menurut Putri dkk. (2023) pada penelitian yang berjudul Dampak Hubungan Masyarakat terhadap Konten Media, melalui kolaborasi dengan media massa, humas dapat menyampaikan informasi mengenai berbagai kebijakan yang ada. Peran humas di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sangat penting dalam membuka akses informasi bagi publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Peran humas di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sangat penting dalam membuka akses informasi bagi publik. Dengan

demikian, keterbukaan informasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi pemerintah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Menurut Grunig dkk. (2013), humas berfungsi sebagai manajemen komunikasi yang bertujuan membangun hubungan positif antara organisasi dan publik, serta merupakan praktik komunikasi manajerial yang memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan para pemangku kepentingan, sementara (Heath & Johansen, 2018) menggambarkan humas sebagai seni dan praktik mengelola komunikasi untuk reputasi yang baik.

Belakangan, keterbukaan informasi publik semakin digalakkan. Keterbukaan informasi publik merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh badan publik, yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang memiliki fungsi dan tugas utama terkait dengan pelaksanaan pemerintahan negara (Alvioni dkk., 2022).

Masyarakat berperan penting dalam kelangsungan negara, menjadikan informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah harus dapat diakses dengan mudah oleh semua orang. Keterbukaan informasi publik memberikan masyarakat hak untuk mengetahui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh badan publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat, mengawasi kinerja pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi (Ismawan & Irma, 2024). Menurut Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik adalah hak setiap orang untuk memperoleh informasi dari badan publik secara terbuka, akurat, dan tepat waktu, dengan akses yang mudah dan tanpa diskriminasi.

Keterbukaan ini sangat penting karena mendukung transparansi pemerintahan, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja badan publik

serta memastikan bahwa keputusan pemerintah dilakukan secara terbuka. Selain itu, keterbukaan informasi meningkatkan akuntabilitas badan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, dan merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi yang relevan. Selain itu, akses terhadap informasi publik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan dengan memungkinkan umpan balik konstruktif dan identifikasi masalah yang perlu diperbaiki.

Menyadari pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, kementerian di Indonesia mulai melakukan pendekatan strategis dengan media massa untuk membantu dalam publikasi informasi kepada publik. Kemenko PMK mengkoordinasikan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan. Sebagai kementerian yang baru disahkan pada tahun 2014, Humas Kemenko PMK sudah membangun kredibilitasnya dengan banyak rilis yang membangun kredibilitas Kemenko PMK.

Karena perannya yang strategis dalam mengkoordinasikan kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko PMK menjadi tempat magang pilihan penulis. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sektor-sektor yang diatur oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyerap anggaran yang besar dalam APBN. Anggaran untuk Pendidikan mencapai Rp612,2 triliun, Kesehatan Rp178,7 triliun, dan Perlindungan Sosial Rp496,8 triliun. Jika dijumlahkan, totalnya mencapai Rp1.287,7 triliun. Sementara itu, total belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2023 adalah Rp3.123,4 triliun. Dengan demikian, sektor yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK menyumbang sekitar 41,22% dari total anggaran tersebut.

Meskipun angka ini belum mencapai 50%, kontribusinya tetap sangat signifikan. Hal ini menunjukkan peran penting Kemenko PMK dalam memastikan program-program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui peran humas, Kemenko PMK juga memiliki tugas untuk

menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan transparan, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus meningkat.

Hal ini tentu akan sulit dilakukan tanpa keterlibatan media massa, mengingat keragaman publik yang luas. Sebagai upaya untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, hubungan dengan media sangat diperlukan. Terlebih di era keterbukaan informasi, di mana informasi bukan hanya menjadi milik lembaga, tetapi juga milik masyarakat. Oleh karena itu, humas perlu membangun jaringan yang luas serta menjalin hubungan harmonis dengan media massa.

Hubungan media telah didefinisikan sebagai proses strategis untuk membangun dan memelihara hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan media massa. Dozier dkk. (2013) menekankan peran hubungan media dalam manajemen komunikasi publik untuk mempengaruhi opini publik dan memperkuat kredibilitas organisasi. Breakenridge (2013) menggarisbawahi pentingnya membangun jaringan dengan wartawan dan editor melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Dalam penyebaran informasi publik, humas instansi pemerintahan sangat bergantung pada media untuk mempublikasikan aktivitas yang telah atau sedang berlangsung. Oleh karena itu, hubungan antara humas dan media adalah hubungan dua arah, di mana humas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh media, sementara media menyajikan berita dan komentar. Untuk membina hubungan ini, humas melakukan berbagai kegiatan terkait media massa atau pers, seperti konferensi pers dan jumpa pers dengan pejabat pemerintah kepada wartawan (Tolapa, 2018). Di Kemenko PMK, acara Deputy Meet the Press secara rutin diadakan untuk memberikan informasi terbaru mengenai kegiatan yang akan datang, sedang berlangsung, atau telah dilaksanakan.

1.2. Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas kerja humas, khususnya pada media relation, di instansi pemerintahan. Secara lebih rinci, pelaksanaan magang ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut berikut:

1. Mengetahui dan mempelajari peran dan kewajiban sebagai penulis Humas Biro HUPOK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang hanya dapat diperoleh melalui praktik kerja langsung di lapangan serta menjalin relasi dengan berbagai rekan.

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan kerja magang dilaksanakan mulai 2 Mei hingga 30 Agustus 2024 dengan total durasi 640 jam kerja, sesuai dengan Panduan MBKM Magang Track 1 serta arahan yang disampaikan dalam sesi Pre-Activity berupa Briefing Magang. Kegiatan ini bertempat di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, dengan penempatan di Media Center Kemenko PMK. Berikut adalah jadwal kerja magang yang telah disepakati:

Hari Kerja Aktif : Senin – Jumat

Jam Kerja : 07.30 - 16.00 WIB

Sistem Kerja : Luring

Perubahan dapat terjadi dari jadwal terlampir apabila terjadi hal lain yang berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan jadwal yang terlampir serta penjelasan tersebut, penulis telah memenuhi persyaratan 80 hari kerja atau 640 jam yang telah disepakati oleh pihak kampus sebelum pelaksanaan sidang magang pada Januari 2025 mendatang.

1.3.2 Prosedur Kerja Magang

A. Proses Administrasi Kampus (UMN)

1. Mengikuti Briefing Magang yang diadakan oleh Program Studi Komunikasi Strategis UMN.
2. Mengisi KRS sesuai dengan ketentuan MBKM Internship Track 1 di my.umn.ac.id, dengan memenuhi persyaratan minimum 110 SKS, tidak memiliki nilai di bawah batas minimum, serta telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib.
3. Mengajukan lebih dari satu formulir KM-01 melalui platform yang disediakan oleh Program Studi untuk mendapatkan tempat magang yang memenuhi kriteria.
4. Melakukan registrasi di merdeka.umn.ac.id dan my.umn.ac.id setelah formulir KM-01 disetujui dan diterima untuk magang di perusahaan yang dipilih.
5. Mengunduh formulir KM-03, KM-04, KM-05, KM-06, dan KM-07 sebagai bagian dari proses penyusunan laporan magang.

B. Proses Pelamaran dan Perekrutan Tempat Kerja Magang

1. Mengirimkan Curriculum Vitae (CV), surat lamaran, dan surat pengantar dari kampus secara langsung ke Biro HUPOK Kemenko PMK pada 18 April 2024.
2. Mengikuti proses seleksi melalui wawancara dengan HR Humas Biro HUPOK Kemenko PMK.
3. Menerima pemberitahuan lolos seleksi melalui WhatsApp pada 26 April 2024 dan memulai magang pada 2 Mei 2024.

C. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

1. Praktik kerja magang dilaksanakan sebagai penulis Humas di Biro HUPOK Kemenko PMK.
2. Penugasan dan kebutuhan informasi dibimbing oleh Travita Bianca selaku Pembimbing Lapangan.
3. Pengisian dan penandatanganan formulir KM-03 hingga KM-07 dilakukan selama praktik kerja magang berlangsung, serta

mengajukan lembar penilaian kerja magang (KM-06) kepada Pembimbing Lapangan di akhir periode magang.

D. Proses Penulisan Laporan Kerja Magang

Pembuatan laporan magang didampingi oleh Dr. Sari Monik Agustin selaku Dosen Pembimbing melalui email sebagai bentuk bimbingan.

E. Laporan praktik kerja magang yang telah disetujui diajukan

